

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Laporan Penelitian dan Jurnal

- Agustina, Shinta, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ancel, Marc, 2001, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London.
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsmi, 2014, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan ke-15, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- Arlukito, Hiazintus Yuriko, 2014, Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Terhadap Hak Mendahulu Atas Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tidak dipublikasi, Yogyakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Dimyati, Johni, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Kencana, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, *et.al.*, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta.
- Fauzan, H.M., 2015, *Peranan Perma & Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Teradilan Yang Agung*, Kencana, Jakarta.

- Friedman, Lawrence M., 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Garner, Bryan A, 1999, *Black Law's Dictionary*, 7<sup>th</sup> edition, West Group, St. Paul.
- Ginting, Elvira Dewi, 2010, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Cetakan kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, *et.al*, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-14, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan, Bagus, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, PT. Alumni, Bandung.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Bandung, PJIH Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 628-650.
- Mahfud MD, Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-10, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Hasanuddin Law Review*, Makassar, Volume 1 Issue 3, Desember 2015, hlm. 316-336.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurdin, Adriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan*, Andi, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Bagus Teguh, 2015, Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan dalam Perkara Pidana Korupsi dan Atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Airlangga, Tidak dipublikasikan, Surabaya.
- Sastrawidjaja, H. Man S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.
- Shubhan, M. Hadi 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.
- Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta.
- Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.
- Suyudi, Aria, *et al.*, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan di Negeri Pailit*, Cetakan ke-2, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Yogyakarta, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm. 1-13.

Wijayanta, Tata, Kewenangan Pengadilan Menyelesaikan Perkara Kepailitan: Suatu Kajian Perbandingan di Indonesia dan Malaysia, *Yustisia*, Surakarta, Nomor 77, Mei-Agustus 2009, hlm. 47-56.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yulius, H., Menyelisik Makna Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Optik Hermeneutika Hukum, *Varia Peradilan*, Jakarta, No.360, November 2015, hlm. 5-26.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Agung Nomor 1 Tahun 1956.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 08 Februari 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 April 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 PK/Pdt.Sus/2012 perihal Peninjauan Kembali Perkara Perdata Khusus (kepailitan) antara Wahyudi Dewantara, SH (Pemohon Peninjauan Kasasi) terhadap Kepala Kepolisian RI (Termohon Peninjauan Kasasi I) dan Badan Pertanahan Nasional RI (Termohon Peninjauan Kasasi II), tanggal 20 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 perihal perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi antara Gindo Hutahaeen, SH dan Martin Erwan, SH selaku Tim Kurator PT. Aliga Internasional Pratama melawan Jaksa Agung RI, tanggal 01 April 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1533 K/Pdt. Sus-Pailit/2017 perihal perkara perdata khusus Kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi antara Allover Herling Mengko, SH dan Dudi Pramedi, SH selaku tim kurator PT. Meranti Maritime (penggugat) melawan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (tergugat).

### **Internet dan Sumber Lainnya**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Program Legislasi Nasional”, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses tanggal 14 Agustus 2018.

James Purba, Jamaslin, Hukum Kepailitan Indonesia dan Hukum Acara Pengadilan Niaga, *Makalah*, Seminar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jakarta, 20 April 2018.

Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002, Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian undang-Undang”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses tanggal 19 April 2018.

Surat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri Nomor: R.03/PU/V/2002, tanggal 13 Mei 2002 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

**Wawancara:**

Purba, Jasmaslin James 2018, Problematika Penerapan Sita Umum Kepailitan Terhadap Penyitaan dalam Perkara Pidana, *Wawancara*, Jakarta, 21 Juni.

Rianta, Sugeng, 2018, Problematika Penyitaan Perkara Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan, *Wawancara*, Jakarta, 19 Juli.

Suhartono, Wiwik, 2018, Problematika Benturan Norma Sita Umum Kepailitan dan Penyitaan dalam Perkara Pidana, Jakarta, *Wawancara*, 13 Juli.